

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PUTRPKP

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD tahunan dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD Lingkup Kabupaten yaitu RKPD dan RENSTRA untuk lingkup Dinas. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, kodifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional

Renja Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2026 tidak terlepas dari Renstra Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar 2025-2029. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar yang merupakan indikator kinerja kunci pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, oleh karena itu penyusunan Renja OPD ini harus melibatkan semua stake holder dan pemangku kepentingan agar hasilnya menjadi sangat representatif dan mengakomodir kepentingan Masyarakat Kabupaten Takalar secara global. Renja DPUTRPKP Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Tahun 2026 mendatang.

Takalar, 11 Juni 2025

Kepala Dinas,



Budiar Rosal Saleh. S.STP..M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19800520 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

BAB I : Pendahuluan..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024..... 5

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan
 Capaian Renstra PD 5

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 16

 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 21

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

 2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat 42

BAB III : Tujuan Sasaran Perangkat Daerah..... 99

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 99

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....102

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah108

 4.1 Daftar Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
 Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Penutup117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebuah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTRPKP tahun 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar periode 2025-2029. Perencanaan tahun 2026 di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar memegang peranan yang cukup penting, terutama dalam rangka menuntaskan/mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan pekerjaan umum, Tata Ruang dan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026, substansi Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2026 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan pendekatan bottom-up yang merupakan ide dan usulan-usulan masyarakat setempat yang dianggap penting untuk dilaksanakan tahun berikutnya. Kemudian pendekatan top-down yang merupakan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah provinsi atau pusat untuk dapat dilaksanakan berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis. Selanjutnya pendekatan politis yang ide dan gagasan pembangunan bersumber dari legislatif selaku perwakilan rakyat dan terakhir pendekatan yang dilakukan dinas PUTRPKP adalah teknokratik yang bersumber dari analisis internal sesuai bidang keahlian yang dimiliki untuk pencapaian tupoksi secara optimal. Keseluruhan pendekatan yang dilakukan tersebut disinergikan untuk memprioritaskan program/kegiatan yang penting secara bersama-sama dalam tahun berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar ditetapkan dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja 2026 Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 675);
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
- 15) Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 16) Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar;
- 17) Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 15);
- 18) Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 246 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PUTRPPK) Kabupaten Takalar Tahun 2026 ini adalah :

- 1) Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD kedalam program/kegiatan tahunan.
- 2) Untuk menyiapkan acuan bagi RAPBD
- 3) Untuk menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi OPD).

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Takalar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi ; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja, dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman, bina konstruksi dan tata ruang) yang meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran yang meliputi : Telaah terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD dengan didasarkan kepada isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rancangan Renstra OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar berisi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi daerah, pencapaian SDGs, dan sebagainya untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan berdasarkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaen Takalar yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Kemudian uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan seperti jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan dan total kebutuhan dana menurut sumber pendanaannya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian berupa: (i) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, (ii) Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan (iii) Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUTRPKP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPUTRPKP

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP) Tahun 2025.

TABEL II-1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PUTRPKP s/d TAHUN 2025
PROVINSI SULAWESI SELATAN / KABUPATEN TAKALAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dna Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 akhir Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	$8 = (\frac{7}{6}) \times 100$	9	$10 = (5 + 7 + 9)$	$11 = (\frac{10}{4}) \times 100$
					DINAS PUPRPKP									
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		81,91%	100%	110%	110,13%	100,0%	87,7%	65,3%
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	85,7%	100%	100,00%	86,11%
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	9	2	3	3	100,0%	2	7	77,78%

1	03	01	2.01	02	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dok)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	1	4	4	100,0%	4	9	225,00%
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun (Laporan)	16	4	4	4	100,0%	4	12	75,00%
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		99%	100%	99%	98,8%	100%	99%	64,81%
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji (77 Orang selama 14 bulan)	3.234	1.050	828	828	100,0%	924	934	28,88%
						Jumlah ASN yang menerima TPP (77 Orang selama 12 bulan)	2.772	900	828	690	83,3%	792	2.382	85,93%
						Jumlah ASN yang menerima objektivitas lainnya (50 Orang selama 12 bulan)	360	50	90	-	0,0%	-	50	13,89%
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas (Paket)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun/Neraca Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%

1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun (Laporan)	4	1	1	1	0,0%	2	4	100,00%
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	75,00%
1	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun (Laporan)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	16	4	4	4	100,0%	4	12	75,00%
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Paket)	16	4	4	4	100,0%	4	12	75,00%
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	75,00%
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan (Laporan)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		68%	100%	68%	92,4%	100%	78%	67,67%
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Jenis)	8	3	2	2	100,0%	2	7	87,50%
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	5	2	1	1	100,0%	1	4	80,00%

1	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Yang Disisapkan Untuk Tamu Kantor (Kali)	600	150	200	125	62,5%	172	447	74,50%
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	1.250	604	208	207	99,5%	302	1.113	89,04%
1	03	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan website SKPD (Paket)	4	1	1	1	100,0%	1	3	75,00%
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	75,00%
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rek. wifi yang dibayarkan (Rekening)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
						Jumlah rek. air yang dibayarkan (Rekening)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
						Jumlah rek. listrik yang dibayarkan (Rekening)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)	48	12	12	12	100,0%	12	36	75,00%
1	03	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		7%	100%	1,39%	0,7%	100%	36%	13,53%
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	148	3	37	1	2,7%	37	41	27,70%
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	140	2	35	-	0,0%	35	37	26,43%
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Rasio		49,81%	100,00%	49,81%	29,72%	100,00%	66,54%	27,85%

						jaringan irigasi, Persenatse pengembangan, pengelolaan, dan konservasi								
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0%	100%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
1	03	02	2.01	117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0	-	-	-	0,0%	-	-	0,00%
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		99,62%	100,00%	99,62%	59,43%	100,00%	99,75%	55,69%
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang dibangun dalam kondisi baik (m)	4.000	2.500	1.000	-	0,0%	1.000	3.500	87,50%
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang direhab dalam kondisi baik (m)	4.000	400	1.000	1.783	178,3%	1.000	3.183	79,58%
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		27,99%	100%	0,00%	0,00%	100%	70,65%	78,67%
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		27,99%	100%	0,00%	0,00%	100%	70,65%	78,67%

1	03	03	2.01	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	300	225	-	-	0,00%	11	236	78,67%
1	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	4	-	1	-	0,00%	1	1	25,00%
1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	500	-	125	-	0,00%	365	365	73,00%
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%	33,33%	25,00%
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%	33,33%	25,00%
1	03	05	2.01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	4	-	-	-	0,00%	1	1	25,00%
1	03	05	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	500	-	125	-	0,00%	214	214	42,80%
1	03	05	2.01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dok)	4	-	1	-	0,00%	1	1	25,00%

1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		47,74%	100%	100,00%	100,00%	100%	82,58%	60,11%
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		48%	100%	100%	100,00%	100%	82,58%	60,11%
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran draenase yang dibangun dalam kondisi baik (m)	5.800	3.485	330	330	100,00%	1.089	4.904	84,55%
1	03	06	2.01	21	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	1.500	-	534	534	100,00%	1	535	35,67%
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		0,00%	100%	100,00%	0,00%	100%	100,00%	17,10%
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	17,10%
1	03	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Org)	50	-	12	-	0,00%	17	17	34,00%

1	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dok)	500	-	125	-	0,00%	1	1	0,20%
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		15,89%	100%	15,89%	131,25%	100%	43,93%	81,54%
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		16%	100%	16%	131,25%	100%	44%	81,54%
1	03	09	2.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	65	17	16	21	131,25%	15	53	81,54%
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, rasio panjang jalan dan jembatan		78,89%	100%	78,89%	75,00%	100%	85,93%	29,16%
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		79%	100%	79%	75,00%	100%	86%	29,16%

1	03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dok)	12	1	1	1	100,00%	1	3	25,00%
1	03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	499	41	5	5	100,00%	8	54	10,82%
1	03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	8	0	2	-	0,00%	2	2	30,00%
1	03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	5	2	1	1	100,00%	1	4	80,00%
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		189,29%	100,00%	189,29%	66,67%	100,00%	160%	87,50%
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		100%	100%	100%	33,33%	100%	100%	75,00%
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah laporan terkait Profil pekerjaan Konstruksi (Laporan)	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Kelembagaan Jasa Konstruksi (kegiatan)	32	1	1	1	100,00%	30	32	100,00%

1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		89%	100%	100%	100,00%	100%	96%	75,00%
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	75,00%
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang/Website (Paket)	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							100%	242,14%	40,42%
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100,00%	100%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	37,50%
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota		100%	100%	0%	0,00%	100%	67%	37,50%
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dok)	4	1	1	-	0,00%	1	2	50,00%

1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dok)	4	1	1	-	0,00%	1	2	50,00%
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	15,00%
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	10	-	1		0,00%	3	3	30,00%
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	8	-	1		0,00%	0	0	0,00%
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN		84,62%	100%	84,62%	0,00%	100%	89,74%	12,50%
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	12,50%
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi (Dok)	4	1	-	-	0,00%	-	1	25,00%

1	04	03	2.03		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	750,00%
1	04	03	2.03		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	50	0	13	0	0,00%	375	375	750,00%
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	71,25%
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	100%	100%	100,00%	100%	570%	71,25%
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	80	34	13	13	100,00%	10	57	71,25%

Adapun penjelasan dari tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPUTRPKP dan Pencapaian Renstra DPUTRPKP s/d Tahun TW II 2025 Kabupaten Takalar di atas adalah:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja :

Adapun program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :

1. Untuk Tahun 2023, ada 9 Program yang tidak mencapai target kinerja yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Kab/Kota; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penataan bangunan dan lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota;Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Kawasan Permukiman;
2. Untuk Tahun 2024, ada 7 Program yang tidak mencapai target kinerja yaitu : Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Kab/Kota; Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; Program Penataan bangunan dan lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota; Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman;
3. Untuk Tahun 2025, masih dalam tahapan sampai di Triwulan II, Program yang belum mencapai target kinerja ada 10 Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Kab/Kota; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penataan bangunan dan lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota;Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Perumahan;

B. Realisasi Program yang memenuhi target kinerja

1. Untuk Tahun 2023, ada 3 Program yang mencapai Target Kinerjanya, yaitu : Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Pengembangan Perumahan; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
2. Untuk Tahun 2024, ada 5 Program yang mencapai target kinerjanya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
3. Untuk Tahun 2025, ada 1 Program yang mencapai target kinerjanya yaitu : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

C. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

Adapun program / kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu: Pada Tahun 2025 untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian sebesar 160%

D. Faktor-Faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:

1. Isu Pemotongan Anggaran menjadi Faktor Utama Kegiatan Kegiatan Fisik di Dinas tidak terlaksana. Dari 12 Program, ada 9 program di Tahun 2023 dan 7 Program di Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran, yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan fisik pada sub kegiatan tidak terlaksana, bahkan ada Rekening Belanja Modal dalam bentuk Perencanaan Tejnisnya saja yang bias dijalankan sedangkan Paket fisiknya dirasionalkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan:

1. Alokasi Anggaran yang cukup tersedia pada DPA Dinas PUTRPKP TA.2024 dapat memenuhi terselenggaranya kegiatan rutin dalam lingkup Dinas
2. Data Kinerja Dinas Sebelumnya, menunjang terlaksananya kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan;
3. Peran aktif masyarakat dan stakeholder lain dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum sehingga dapat terselenggara dengan baik dan berimplikasi target kinerja dapat terpenuhi.

E. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pekerjaan Umum,Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renja DINAS PUTRPKP Kabupaten Takalar. Keberhasilan pencapaian target capaian kinerja didorong oleh beberapa faktor. Dinas PUTRPKP yang bergerak di Bidang Infrastruktur memiliki SDM dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang berkinerja optimal sehingga aktivitas dapat terlaksana dan output dapat dihasilkan sesuai rencana. Kondisi tersebut juga mendorong koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan mitra perangkat daerah berjalan dengan baik. Selain dukungan SDM yang memadai, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap dan berkondisi baik mendukung terhadap efisiensi kinerja. Faktor pendanaan juga turut mengambil peran dengan ketersediaan yang tepat waktu dan tepat jumlah.untuk paket pekerjaan fisik, kondisi 2 tahun terakhir ini yang dialami Dinas adalah dihilangkannya Unsur "*Pengelolaan Kegiatan*" dalam setiap Paket Pekerjaan teknis sehingga menampakkan Implikasi terhadap Kualitas Pekerjaan yang kurang terjamin, di mana fungsi kontrol dari pihak internal Dinas sangat dibutuhkan untuk menghindari 'Pengaturan' Bersama antara Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengerjaan Fisik dan Konsultan Pengawasan. Selanjutnya, beberapa output dibiayai oleh anggaran rutin sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh dinamisme

rasionalisasi/perubahan anggaran. lalu, komitmen tinggi Pimpinan memiliki kontribusi tinggi dalam pencapaian target output dan program. Terlepas dari keberhasilan yang dicapai, terdapat permasalahan permasalahan yang dihadapi. Secara umum permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pencairan anggaran yang tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pemenuhan dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan. Masih terjadi ketidaktepatan dalam penyusunan rencana aksi yang menyebabkan tingginya kecenderungan dilakukannya pergeseran kegiatan yang berpengaruh kepada pergeseran anggaran. Faktor eksternal lain adalah kurangnya koordinasi antara pihak ketiga dalam suatu paket pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dengan pihak internal Dinas PUTRPKP sehingga sering kali muncul kendala teknis di lapangan dalam pencapaian tujuan kegiatan. Hal ini menimbulkan inefisiensi waktu pelaksanaan penghasilan output kegiatan.

F. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran

Dinas PUTRPKP sebagai OPD yang mengampu fungsi Pemerintahan Bidang Infrastruktur di Kabupaten telah beberapa kali menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memunculkan kembali Unsur ‘Pengelolaan Kegiatan’ dalam setiap Paket Pekerjaan dengan maksud untuk menjaga kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan. Selain itu menyikapi kekurangan SDM yang mempunyai Kompetensi di Bidang Jalan dan Jembatan; SDM Pengairan; Penata Ruang Wilayah; dan yang lainnya dilihat dari kondisi Peta Jabatan Dinas masih banyak terdapat Rumah jabatan yang kosong/kurang hal ini akan berimplikasi terhadap kualitas kinerja Dinas secara Umum, Tindakan yang perlu dilakukan adalah bermohon ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk bisa mengisi jabatan jabatan yang kosong sesuai dengan kompetensinya, Tindakan lainnya adalah peningkatan kompetensi ASN yang ada saat ini dalam bentuk menugaskan/ikutserta dalam Peningkatan Kapasitas baik dalam bentuk Diklat teknis ke-PUan dan Bimtek serta Sosialisasi, dengan kata lain menganggarkan Biaya Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Program/kegiatan/Sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-2
 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan TA 2024
 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.
 Takalar

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1.	Program	12	2	14	-	10	1	1	99,87,%	92,,05%	SR	SR
2.	Kegiatan	20	2	20	-	18	1	1	90%	96,24%	SR	SR
3.	Sub Kegiatan	47	2	50	-	45	1	1	95.74%	96%	SR	SR

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja semester II Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Dinas PUTRPKP dapat dikatakan Sangat Rendah. Dari 12 program kegiatan Dinas, realisasi capaian kinerjanya 100% dan >100% ada 2 Program, dari 2 kegiatan ada 1 kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100% dan dari 45 sub kegiatan, dengan 47 indikator sub kegiatan, ada 45 indikator sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja <100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas PUTRPKP

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaraan yang menjadi mandatnya. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	Realisasi Capaian	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian TW II	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2024		2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	100,00%	98,30%	Indeks Kualitas Layanan Infrastrukur	79,90	80,63	80,53	-	80,63	80,53	Pengukuran Kinerja di akhir Tahun berjalan
2	Persentase Peningkatan kondisi kemandapan jalan kabupaten	71,20%	63,46%	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	23,00	24,00	25,00		24,00	25,00	Pengukuran Kinerja di akhir Tahun berjalan
3	Persentase Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten	85,00%	74,22%	Persentase Rumah dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	92,50	93,00	93,50	92,50	93,00	93,50	Pengukuran Kinerja di akhir Tahun berjalan
4	Rasio kepatuhan PBG kab/kota	100,00%	100,00%	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,50	2,00	2,50	1,40	2,00	2,50	Pengukuran Kinerja di akhir Tahun berjalan
5	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	45,00%	0,00%	Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100,00	100,00	100,00	56,29	100,00	100,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TW II bisa terlaksana
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	70,50	71,00	71,50	70,50	71,00	71,50	Kegiatan masih dalam tahap perencanaan
7	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan	100,00%	0,03%	Tingkat literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (%)	85,00	88,00	90,00	85,00	88,00	90,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TWI bisa terlaksana
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	2,11%	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kerjasama yang baik antar stakeholder, sehingga pencapaian TWII bisa terlaksana
9	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten	92,86%	92,19%								
10	Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP	70,00%	70,00%								

Dari Tabel IKU Dinas PUTRPKP di atas menggambarkan kondisi kinerja Dinas Tahun 2024 pada Periode Renstra 2023-2026 sebagai berikut:

Untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, *Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten* dari target kinerja sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46%, dimana Panjang Jalan Kabupaten sebesar 754,49 KM yang terdiri dari 348 ruas jalan, Kondisi Jalan Baik sebesar 335,13 KM atau 44,42%; Kondisi Jalan sedang sebesar 94,65 KM atau 12,54%; Kondisi Jalan rusak ringan sebesar 95,54 KM atau 12,66%; Kondisi Jalan Rusak Berat sebesar 229,17 KM atau 30,37%; Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 ini terukur *cenderung turun* dengan berbagai sebab antara lain yang sudah dirasakan saat ini adalah Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk Jalan di tahun ini mengalami refocusing Anggaran dari pusat, hal ini berarti Pembangunan jalan dan Perbaikan Jalan dari Dana DAK di Tahun 2025 Nihil, kondisi yang sama juga dengan sumber dana APBD/DAU Kabupaten karena adanya efisiensi Anggaran

Untuk Pengelolaan Sumber daya Air, Indikator “*Persentase luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier kewenangan Kabupaten*” dengan capaian 74,22% dari target sebesar 85%; Capaian 74,22% atau luas cakupan yang dilayani sebesar 18.400 M didukung oleh 11 (sebelas) D.I ; menurut data yang terbaca di e-paksi ada 11(sebelas) Daerah Irigasi beserta rincian luasan Cakupannya untuk saluran Primer dan Sekunder yaitu:

- DI. Bontorea dengan Luas Cakupan 1.290 M
- DI. Ngai-ngai dengan Luas Cakupan 850 M
- DI. Barugaya dengan Luas Cakupan 1.250 M
- DI. Batang lappo dengan Luas Cakupan 820 M
- DI. Je’ne Maeja dengan Luas Cakupan 3.090 M
- DI. Kampong Bugisi dengan Luas Cakupan 1.260 M
- DI. Katonokang dengan Luas Cakupan 1.020 M
- DI. Lembang loe dengan Luas Cakupan 1.070 M
- DI. Je’ne Tallasa dengan Luas Cakupan 2.790 M
- DI. Balang Tanaya denga Luas Cakupan 3.820 M
- DI. Palilangi dengan Luas Cakupan 1.140 M

Data dukung lainnya, Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten saat ini totalnya 29.270 M yang terkoneksi dengan saluran Primer dan Sekunder, dari 29.270 M itu melayani Area Pertanian di Kab. Takalar seluas 2.108 Ha berbanding dengan Total area Irigasi Kabupaten seluas 2.852 Ha atau pencapaiannya sebesar 73,91%. Pengelolaan Irigasi untuk pertanian rakyat Takalar butuh sentuhan pendanaan yang optimal untuk memajukan sektor pertanian di kabupaten di masa masa yang akan datang, semoga sector irigasi bisa menjadi salah satu prioritas pendanaan untuk tahun tahun berikutnya mengingat Irigasi masuk juga dalam pencapaian Indikator infrastruktur Kabupaten.

“Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota” yang juga merupakan Indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, di akhir Tahun 2024 capaiannya sebesar 2,11% dari Target Kinerja 100%, untuk Tahun 2024 ini ada 3 Rumah terfasilitasi dari 142 Rumah terdampak bencana, sedangkan di Tahun 2025 pada Triwulan I ada 3 Rumah terfasilitasi dari 56 Rumah terdampak Bencana, dari Data yang kami terima jenis bencana yang menimpa adalah Sebagian Bencana angin kencang, berikut Data Rumah Korban Bencana di Tahun 2025 untuk setiap Kecamatan sebagai berikut:

- Kec. Mangarabombang : 3 Unit Rumah
- Kec. Pattallassang : 2 Unit Rumah
- Kec. Galesong Utara : 4 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Selatan : 5 Unit Rumah
- Kec. Kepulauan Tanakeke : 12 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Timur : 1 Unit Rumah
- Kec. Polongbangkeng Utara : 1 Unit Rumah
- Kec. Sanrobone : 1 Unit Rumah
- Kec. Galesong Selatan : 19 Unit Rumah
- Kec. Galesong : 7 Unit Rumah

Faktor yang mendasar minimnya capaian Indikator ini adalah alokasi anggaran yang kurang mendukung program tersebut, dimana kondisi kabupaten mengalami efisiensi anggaran.

Untuk Indikator “*Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota*”, di tahun 2024 mempunyai target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, system yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini terbagi menjadi 2 Bagian, yaitu Numerator dan Denominator sebagai pembaginya, Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota mempunyai satuan Persen(%), dengan rumus perhitungan : $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Gedung sesuai peruntukannya PBG Tahun berjalan}}{\text{Jumlah PBG Tahun berjalan}} \times 100\%$, dengan Nilai Rasio 100% menunjukkan Tingkat kepatuhan masyarakat kab. Takalar untuk pemanfaatan Bangunan Gedung terhadap PBG, Tercapainya realisasi kinerja sesuai target, didukung oleh semua stakeholder, dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pengurusan Sebagian besar Bangunan telah dimanfaatkan sesuai Izin yang diberikan dan Bangunan tersebut perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut.

Indikator kinerja “*Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi*”, diperoleh realisasi kinerja 0% dari target 45%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 0%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 2,83%. Rendah/Tidak adanya realisasi kinerja dalam pencapaian sasaran ini, disebabkan tidak diberikannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Hal ini diharapkan menjadi perhatian khusus, agar memenuhi kebutuhan penganggaran, terutama untuk kegiatan yang masuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja “*Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan*”, diperoleh realisasi kinerja 100 % dari target 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan dan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan SPM yang memadai.

Untuk Indikator “*Persentase Rumah Layak Huni kabupaten*”, capaian di Tahun 2024 sebesar 92,19% dari besaran target tahunan sebesar 92,86%, dari capaian tersebut masuk di kategori *sangat tinggi*. Data tambahannya bahwa Jumlah Unit Rumah di Kabupaten sebesar 72.297 Unit Rumah sedangkan Data Tahun 2025 per TW I, Rumah tidak layak huni sebesar 5.330 Unit Rumah dan Rumah layak huni sebesar 66.967 Unit rumah atau pencapaian sebesar 92,627% di tingkat Kabupaten atau terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0,437 %; dengan berharap dukungan pendanaan yang layak semoga Dinas PUTRPKP dapat melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 96% untuk Indikator dimaksud.

Untuk Indikator “*Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman*”, Kategori layak dan aman untuk sanitasi menggambarkan ketersediaan dan penggunaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar Kesehatan, di mana limbah buangan manusia ditangani secara aman untuk mencegah penyakit dan dampak lingkungan, Penanganan secara aman maksudnya fasilitas sanitasi yang hanya digunakan oleh rumah tangga sendiri; dilengkapi dengan kloset leher angsa; memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangka septic atau system pengolahan air limbah (IPAL/SPAL); tangka septic harus disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun dan lumpurnya diolah di IPLT dan disambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat(SPALD-T).

Data capaian per akhir Tahun 2024 menunjukkan bahwa target SDGs sebesar 2% sedangkan capaiannya baru 1,7%; di Tahun 2025 ini ternyata indikator tersebut

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTRPKP dengan Target di Tahun I Renstra Dinas atau Target Tahun 2025 sebesar 7%, hal ini menjadi motivasi tambahan Dinas PUTRPKP di mana terjadi peningkatan target yang signifikan sebesar 5% (dari 2% menjadi 7%). Keberadaan terbentuknya UPT. PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik) di Kab. Takalar menjadi harapan Besar Target Kinerja IKU Dinas PUTRPKP ini bisa tercapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) *Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)* adalah Indikator baru dimunculkan di Renstra Periode Tahun 2025-2029 selaras dengan Misi Bupati - Wakil Bupati Takalar 5 Tahun kedepan untuk Peningkatan PAD di Kabupaten Takalar, kilas balik Realisasi PAD di Dinas PUTRPKP Tahun 2024 ada 2 Jenis Retribusi yang dikelola Dinas PUTRPKP yaitu : Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Penyewaan Alat Berat), Target PAD untuk kedua Retribusi tersebut di Tahun 2024 adalah Rp 530.000.000,- sedangkan Capaian Realisasinya sebesar Rp 623.892.565,- atau 117,72% Di Tahun 2025, Dinas PUTRPKP mengelola 3(tiga) Jenis Retribusi yaitu Retribusi PBG dengan target PAD sebesar Rp 500.000.000,-; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Penyewaan Alat Berat) dengan target PAD sebesar Rp 30.000.000,- dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Retribusi Pengolahan Lumpur Tinja) dengan target PAD : Rp 15.000.000,- untuk Triwulan I 2025 ini Realisasi Rp 281.462.206,- atau 56,29% dari Target PAD Tahun 2025 dan diprediksi Optimis Target bisa tercapai di triwulan II Tahun 2025.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas PUTRPKP

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program, terutama dalam konteks pemerintahan. IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK tidak hanya sekedar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Adapun target dan realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah digambarkan pada tabel II-4 berikut :

Tabel II-4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PUTRPKP
Kabupaten Takalar

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	40,00%	42,00%	45,00%	47,00%	50,00%	22,96%	22,96%	22,96%	36,11%	36,11%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00%	30,00%	35,00%	45,00%	50,00%	12,29%	12,89%	21,80%	23,22%	23,22%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	75,00%	77,00%	79,00%	83,00%	85,00%	74,04%	74,05%	74,08%	74,08%	74,22%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	98,12%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,51%

6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Tingkat Kemantapan Jalan	64,54%	63,90%	65,77%	70,20%	71,20%	64,51%	63,90%	62,77%	61,71%	63,46%
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	45,00%	4,60%	1,06%	2,11%	1,13%	0,00%
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,878%	2,11%
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,00%	8,52%	0,00%	7,83%	7,14%	8,52%	8,52%	8,50%	7,81%	7,81%
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,00%	0,00%	0,00%	16,95%	33,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Gambaran Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) kewenangan Dinas PU:

1. **Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota**, target tahun 2024 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 36,11% atau capaian sebesar 72,22%, indikator ini tidak tercapai targetnya, faktor penghambat adalah Penyelesaian permasalahan harus dilaksanakan di daerah hulu, yang membutuhkan biaya yang besar
2. **Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**. Target Tahun 2024 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 23,22% atau capaian sebesar 46,44%, indikator ini tidak mencapai targetnya, factor penghambatnya adalah karena alokasi anggaran untuk indikator ini sangat kecil dibandingkan dengan wilayah terdampak, tidak bisa mengandalkan sumber dana dari APBD Kabupaten, perlu bantuan alokasi anggaran dari Provinsi maupun pusat.
3. **Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**, Target Tahun 2024 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 74,22% atau capaian 87,32%, indikator ini tidak mencapai targetnya faktor penghambat adalah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) memprioritaskan pada Rehabilitasi jaringan Irigasi, alokasi DAK masih lebih besar dibanding alokasi sumber dana APBD.

Untuk Pengelolaan Sumber daya Air, Indikator “*Persentase luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier kewenangan Kabupaten*” dengan capaian 74,22% dari target sebesar 85%; Capaian 74,22% atau luas cakupan yang dilayani sebesar 18.400 M didukung oleh 11 (sebelas) D.I ; menurut data yang terbaca di e-paksi ada 11(sebelas) Daerah Irigasi beserta rincian luasan Cakupannya untuk saluran Primer dan Sekunder yaitu:

- DI. Bontorea dengan Luas Cakupan 1.290 M
- DI. Ngai-ngai dengan Luas Cakupan 850 M
- DI. Barugaya dengan Luas Cakupan 1.250 M
- DI. Batang lappo dengan Luas Cakupan 820 M
- DI. Je’ne Maeja dengan Luas Cakupan 3.090 M
- DI. Kampong Bugisi dengan Luas Cakupan 1.260 M
- DI. Katonokang dengan Luas Cakupan 1.020 M
- DI. Lembang loe dengan Luas Cakupan 1.070 M
- DI. Je’ne Tallasa dengan Luas Cakupan 2.790 M
- DI. Balang Tanaya denga Luas Cakupan 3.820 M
- DI. Palilangi dengan Luas Cakupan 1.140 M

Data dukung lainnya, Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten saat ini totalnya 29.270 M yang terkoneksi dengan saluran Primer dan Sekunder, dari 29.270 M itu melayani Area Pertanian di Kab. Takalar seluas 2.108 Ha berbanding dengan Total area Irigasi Kabupaten seluas 2.852 Ha atau pencapaiannya sebesar 73,91%. Pengelolaan Irigasi untuk pertanian rakyat Takalar butuh sentuhan pendanaan yang optimal untuk memajukan sektor pertanian di kabupaten di masa masa yang akan datang, semoga sector irigasi bisa menjadi salah satu prioritas pendanaan untuk tahun tahun berikutnya mengingat Irigasi masuk juga dalam pencapaian Indikator infrastruktur Kabupaten.

4. **Persentase jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**, Target Tahun 2024 sebesar 98,12% dan terealisasi 98,13% atau capaian sebesar 100,01% faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

indikator ini adalah adanya dukungan dari beberapa stakeholder yang berkecimpung di bidang air minum Kabupaten.

Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 37,89%. Terdapat 46 Wilayah Perkotaan di Kabupaten Takalar dari 110 Desa/Kelurahan. Capaian ini masih jauh dari target Nasional yakni 70%, salah satu penyebabnya adalah kemampuan iddel capacity yang dimiliki oleh PDAM sudah tidak tersedia. Nilai persentase ini akan meningkat Ketika SPAM Regional Mamminasata sudah berfungsi dengan target 3.000 sambungan rumah sampai tahun 2027.

5. **Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic**, Target Tahun 2024 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 98,51% atau capaian Indikator sebesar 104,80%, indikator ini melampaui dari targetnya, factor pendorong capaian indikator adalah selain adanya Swadaya dari masyarakat, ada juga dukungan seluruh stakeholder
6. **Rasio kepatuhan IMB kab/ kota**, Target Tahun 2024 sebesar 100%, realisasi sebesar 100% atau capaian indikator juga sebesar 100%, faktor pendukung/penghambat capaian indikator ini adalah minimnya alokasi anggaran untuk sosialisasi di masyarakat
7. **Tingkat Kemantapan Jalan**, Target Tahun 2024 sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46% atau capaian sebesar 89,13%, indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan, factor penghambat adalah minimnya alokasi anggaran untuk indikator ini dari APBD sedangkan DAK Jalan juga tidak kucur di tahun berkenaan.

Untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, *Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten* dari target kinerja sebesar 71,20% dan terealisasi sebesar 63,46%, dimana Panjang Jalan Kabupaten sebesar 754,49 KM yang terdiri dari 348 ruas jalan, Kondisi Jalan Baik sebesar 335,13 KM atau 44,42%; Kondisi Jalan sedang sebesar 94,65 KM atau 12,54%; Kondisi Jalan rusak ringan sebesar 95,54 KM atau 12,66%; Kondisi Jalan Rusak Berat sebesar 229,17 KM atau 30,37%; Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 ini terukur *cenderung turun* dengan berbagai sebab antara lain yang sudah dirasakan saat ini adalah Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk Jalan di tahun ini mengalami refocusing Anggaran dari pusat, hal ini berarti Pembangunan jalan dan Perbaikan Jalan dari Dana DAK di Tahun 2025 Nihil, kondisi yang sama juga dengan sumber dana APBD/DAU Kabupaten karena adanya efisiensi Anggaran

8. **Rasio tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**, Target tahun 2024 sebesar 45% dan tidak ada realisasi kinerja untuk indikator ini atau 0%, factor penghambatnya adalah tidak diberikan alokasi anggaran yang diberikan oleh TAPD Kabupaten saat itu,
9. **Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**, Target Tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau capaiannya 100%, factor pendukung adalah dalam kabupaten Takalar dari hasil pendataan yang dilakukan selama tahun berkenaan adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang terjadi sehingga pencapaian indikator kinerja ini bisa maksimal.
10. **Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**, indikator ini juga adalah indikator standar Pelayanan Minimal, sehingga penetapan target sebesar 100% dan yang terealisasi hanya 2,11%, factor penghambatnya adalah minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten untuk indikator ini sehingga layanan dasar perumahan di kabupaten tidak berjalan semestinya.
11. **Fasilitasi penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program**

Pemerintah kab/kota, target Tahun 2024 sebesar 0% dan terealisasi sebesar 0% juga, artinya dalam skala Kabupaten tidak terfasilitasi Penyediaan rumah yang dimaksud disebabkan karena dalam kabupaten tidak terjadi relokasi rumah akibat program Pemerintah, Pemerintah di Tahun 2024 itu tidak melakukan relokasi rumah warga

12. Persentase Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani,

Target Tahun 2024 sebesar 5% dan terealisasi sebesar 1,05% atau capaian sebesar 21%, Indikator tidak mencapai target yang ditetapkan dengan factor penghambatnya Anggaran untuk indicator ini tidak memadai(minim).

13. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Target Tahun 2024 sebesar 7,14% dan terealisasi sebesar 7,81% atau capaian sebesar 109,38%, indicator ini mencapai target dengan factor pertimbangannya adalah bahwa Data Rumah keseluruhan di Kabupaten senilai 72.297 Unit adalah kondisi pendataan Rumah di Tahun 2019, dengan kata lain bahwa kondisi rumah yang diukur sudah tidak representative karena kemungkinan besar kondisi rumah di Tahun 2024 ini sudah jauh dari perhitungan 5 tahun yang lalu, jadi disimpulkan bahwa indicator pengukurannya sudah tidak bisa mewakili keadaan rumah saat ini.

Jumlah Unit Rumah di Kabupaten sebesar 72.297 Unit Rumah sedangkan Data Tahun 2025 per TW I, Rumah tidak layak huni sebesar 5.330 Unit Rumah dan Rumah layak huni sebesar 66.967 Unit rumah atau pencapaian sebesar 92,627% di tingkat Kabupaten atau terjadi peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 0,437 %; dengan berharap dukungan pendanaan yang layak semoga Dinas PUTRPKP dapat melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 96% untuk Indikator dimaksud.

14. Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum),

Target Tahun 2024 sebesar 33,91% dan terealisasi sebesar 0% atau tidak diukur, karena sebab tidak adanya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pendataan PSU Perumahan di Tahun 2024.

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dinas PUTRPPK Kab. Takalar dalam Urusan Pelayanan Dasar mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengemban 4(empat) indikator SPM sesuai regulasi yang dimaksud, yaitu (a). Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari; (b). Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik; (c). Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; (d). Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; berikut ini data capaian SPM Dinas PUTRPPK per Triwulan I Tahun 2025:

Tabel II-5

[illegible]

Tabel Pencapaian SPM di atas menggambarkan bahwa capaian di triwulan II Tahun 2025 ini masih minim disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Kegiatan yang dilakukan sampai bulan Juni 2025 ini masih dalam tahapan melakukan verifikasi di lapangan terkait objek rumah korban pasca bencana di tahun sebelumnya yang belum mendapatkan intervensi dari Pemerintah; hal lain faktor minimnya pencapaian Persentase Warga yang terkena relokasi dampak Program Pemerintah adalah karena Pemerintah kita tidak melakukan kebijakan yang mengakibatkan warga negaranya harus merasakan relokasi; faktor lainnya bersifat umum seperti belum Juknis terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari dan Penyediaan Pelayanan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, seluruh indikator SPM yang menjadi kewenangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- 1). Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja untuk indikator ini pada awal RPJMD adalah sebesar 88,01, sementara target kinerja tahunan yang harus dicapai selama periode 2018 – 2020 adalah 100%. Data realisasi capaian kinerja yang diraih selama periode 2018 – 2020 hanya diperoleh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 24% atau jauh dibawah realisasi capaian pada awal RPJMD dan tidak dapat memenuhi target tahunan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari masih rendah.
- 2). Penyediaan Pelayanan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Capaian kinerja indikator ini pada awal RPJMD adalah 60%, sementara target tahunan yang direncanakan untuk periode tahun 2018 – 2020 adalah masing masing sebesar 100%. Data capaian kinerja indikator ini hanya diperoleh untuk tahun 2020 yaitu sebesar 0,6% yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPDD) sementara data untuk tahun 2018 dan 2019 tidak tersedia. Jika disandingkan antara capaian kinerja pada awal RPJMD dengan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang cenderung bermakna sebagai penurunan kualitas layanan.

Sedangkan untuk Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan data capaian kinerja yang dirangkum dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Takalar Tahun 2020, ditemukan bahwa semua indikator SPM untuk pelayanan dasar perumahan rakyat dan Kawasan perumahan belum ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Takalar selama periode 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sementara kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Tidak realisasi kinerja untuk indikator ini, penyebabnya adalah karena tidak ada Pagu anggaran yang disediakan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang dilaksanakan terhadap korban bencana. Dari Data hasil rekapan Kami di Dinas PUPRKP Kabupaten Takalar Tahun 2023 terdapat 18 Unit Rumah Korban Bencana yang perlu diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal Rehabilitasi Rumah korban bencana di kabupaten dengan rincian dan jenis bencana sebagai berikut :

- a. Lokasi Kalebentang, Galesong Selatan terdapat 1 unit Rumah KorbanBencana Kebakaran
- b. Lokasi Sawakong, Galesong Selatan terdapat 1 Unit Rumah KorbanBencana Kebakaran
- c. Lokasi Tarowang, Galesong Selatan terdapat 6 unit Rumah Korban Bencana Angin puting beliung
- d. Lokasi Popo, Galesong Selatan terdapat 4 unit Rumah Korban BencanaAbrasi
- e. Lokasi Canrego, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Kebakaran
- f. Lokasi Rajaya, Polongbangkeng Selatan terdapat 3 unit Rumah KorbanBencana Angin puting beliung
- g. Lokasi Bulukunyi, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Kebakaran
- h. Lokasi Bontokadatto, Polongbangkeng Selatan terdapat 1 unit Rumah Korban Bencana Angin puting beliung

Hal tersebut di atas perlu mendapat perhatian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena Indikator ini adalah Indikator layanan Dasar untuk Bidang urusan Pemerintahan.Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Tidak ditemukan data untuk indikator ini selama periode 2023 - 2024 di Kabupaten Takalar karena selama periode tersebut tidak pernah dilakukan relokasi rumah yang programnya diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

2.2.4 Target Capaian SDGs Dinas PUTRPPK

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dinas PUTRPPK sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Takalar telah berkontribusi menyukseskan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kontribusi tersebut khususnya pada *“Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan”*, untuk Sasaran : 6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; *Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi; Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan,*

Dukungan Dinas PUTRPKP terhadap Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) dapat dilihat pada Tabel II-6 berikut :

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Sustainable Development Goals (SDGs)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target		Realisasi Capaian	
		2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN					
Sasaran 6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	28,07	28,12		
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.				
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI					
Sasaran 9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	60%	60,5%	63,46%	56,96%
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
Sasaran 11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.				
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93%	95%	92,19%	
11.3.1 (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.				

Untuk Periode SDGs 2020-2024, dapat kita lihat dalam Tabel SDGs Dinas PUTRPKP di bawah Ini:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	81,74%	96,79%	97,85%	97,20%	98,13%
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	98,12%	90,45%	91,40%	91,42%	97,96%	98,47%
3	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,90%
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	91,00%	91,48%	91,70%	92,17%	92,86%	91,48%	91,48%	91,50%	92,12%	92,19%

Gambaran Pencapaian Indikator SDGs Dinas PUTRPKP

- 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.** Target Tahun 2024 sebesar 94% dan terealisasi sebesar 98,13% atau capaian sebesar 104,39%, Indikator tersebut mencapai target dengan dukungan pendanaan serta dukungan dari beberapa stakerholder bidang air minum;
- 2. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.** Target kinerja indicator ini di Tahun 2024 sebesar 98,12% dan terealisasi sebesar 98,47% atau dengan tingkat capaian senilai 100,36%, indikator ini mencapai target dengan dukungan pendanaan dari APBD maupun sumber Dana DAK Bidang Sanitasi di Tahun berkenaan;
- 3. Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.** Target tahun 2024 sebesar 2% dan terealisasi sebesar 1,90% atau capaian indicator sebesar 95%, Indikator ini tidak mencapai Target dengan factor penghambat adalah Dukungan dana untuk sanitasi aman belum maksimal dibuktikan dengan belum berjalan efektifnya pengelolaan Mobil Tinja di kabupaten Takalar, solusi yang bisa meningkatkan kinerja capaian indicator ini, dengan harapan setelah terbentuknya UPTD. Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Kabupaten Takalar akan semakin memperkuat kinerja di Bidang Sanitasi kategori “Aman”.

Target Nasional Sanitasi aman adalah 15%. Kabupaten Takalar, capaian sanitasi amannya sampai bulan November Tahun 2025 adalah 1,41%. Pencapaian ini masih jauh dari target daerah yakni 6%. Ini diakibatkan, karena baik regulasi, Retribusi, dan Kelembagaan baru terbentuk dan ada di tahun 2024. Regulasinya yakni Perda tentang pengelolaan air limbah domestik Nomor 05 Tahun 2024, Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang memuat tentang tarif jasa penyedotan lumpur tinja dan terkait kelembagaan,

telah terpisah Operator dan Regulator Pengelola air limbah domestik berdasarkan peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUTRPKP kab. Takalar.

Layanan UPT PALD di Kabupaten Takalar masih bersifat On Call, artinya bahwa jasa layanan masih tergantung pada kebutuhan masyarakat. Adapun strategi yang harus dilakukan dalam mencapai target sanitasi aman adalah sbb:

1. Sosialisasi di tiap kecamatan
2. Mewajibkan seluruh rumah ASN untuk dilakukan penyedotan secara berkala (3-5 tahun sekali)
3. Melakukan program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)
4. Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Target Tahun 2024 sebesar 92,86% dan terealisasi sebesar 92,19% atau Capaian indikator sebesar 99,28%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2025-2029) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar sebagai dinas daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah”. Oleh karena itu, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang menjalankan tugas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut aturan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang bina marga, tata ruang, cipta karya, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta pengairan. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar mempunyai fungsi : (i) Perumusan kebijakan teknis; (ii) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; (iii) Pembinaan dan pelaksanaan tugas; (iv) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adalima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif.

Tabel II-7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Takalar

KODE						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rar angan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						1	2	3	4	5		6	7
01						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
01	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase perencanaan pembangunan daerah		100,00%	56.954.000		100,00%	105.000.000
							2. Persentase opini BPK atas laporan keuangan		100,00%	6.695.164.289		100,00%	6.733.290.632
							3. Persentase profesionalitas ASN		100,00%	425.003.400		100,00%	3.157.762.600
1	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	56.954.000		100,00%	105.000.000
1	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	Kab. Takalar	2	18.614.000	Kab. Takalar	2,00	25.000.000
1	03	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	Kab. Takalar	1	5.000.000	Kab. Takalar	1,00	5.000.000
1	03	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	Kab. Takalar	1	8.340.000	Kab. Takalar	1,00	10.000.000
1	03	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dok)	Kab. Takalar	4	5.000.000	Kab. Takalar	4,00	20.000.000
1	03	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	Kab. Takalar	1	3.000.000	Kab. Takalar	1,00	5.000.000
1	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	Kab. Takalar	4	17.000.000	Kab. Takalar	4,00	35.000.000

1	03	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dok)				Kab. Takalar	1,00	5.000.000
---	----	----	---	----	------	--	---	--	--	--	--------------	------	-----------

01	03	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				Kab. Takalar	67,00	10.636.600
01	03	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dok)	Kab. Takalar	1	2.600.000	Kab. Takalar	1,00	10.000.000
01	03	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				Kab. Takalar	22,00	50.000.000
01	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		100,00%	86.592.800		100,00%	402.100.000
01	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				Kab. Takalar	1,00	5.000.000
01	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				Kab. Takalar	1,00	5.000.000
01	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kab. Takalar	2	994.800	Kab. Takalar	2,00	9.700.000
01	03	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dok)	Kab. Takalar	12	6.100.000	Kab. Takalar	12,00	2.400.000
01	03	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	Kab. Takalar	4	2.200.000	Kab. Takalar	4,00	10.000.000
01	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	Kab. Takalar	302	76.298.000	Kab. Takalar	12,00	300.000.000
01	03	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)				Kab. Takalar	4,00	10.000.000
1	03	01	2,06	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dok)	Kab. Takalar	1	1.000.000	Kab. Takalar	1,00	10.000.000
01	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		100,00%	1.591.226.000
01	03	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	2,00	79.994.000

01	03	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	1,00	498.810.000
01	03	01	2	07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	1,00	567.000.000
01	03	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	40,00	26.422.000
01	03	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	7,00	119.000.000
01	03	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	1,00	150.000.000
01	03	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	5,00	100.000.000
01	03	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				Kab. Takalar	5,00	50.000.000
01	03	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00%	264.871.500		100,00%	736.800.000
01	03	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)				Kab. Takalar	4,00	16.800.000
01	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Lap)	Kab. Takalar	12	37.471.500	Kab. Takalar	12,00	270.000.000
01	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Lap)	Kab. Takalar	12	227.400.000	Kab. Takalar	12,00	450.000.000
01	03	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100,00%	50.414.800		100,00%	312.000.000
01	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kab. Takalar	37	33.000.000	Kab. Takalar	37,00	90.000.000
01	03	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kab. Takalar	35	17.414.800	Kab. Takalar	35,00	55.000.000
01	03	01	2	09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	umlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)				Kab. Takalar	2,00	35.000.000

01	03	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)					Kab. Takalar	15,00	8.000.000
01	03	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					Kab. Takalar	17,00	9.000.000
01	03	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)					Kab. Takalar	1,00	100.000.000
01	03	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)					Kab. Takalar	15,00	10.000.000
01	03	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Unit)					Kab. Takalar	10,00	5.000.000
01	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman		0,00%	-			9,00%	1.910.000.000
							2. Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob		10,00%	70.000.000			13,00%	2.800.000.000
							3. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		33,00%	4.535.854.000			57,00%	12.000.000.000
01	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,00%	70.000.000			80,00%	4.710.000.000
01	03	02	2	01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)					Kab. Takalar	1,00	100.000.000
01	03	02	2	01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)					Kab. Takalar	0,05	200.000.000
01	03	02	2	01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)					Kab. Takalar	0,10	200.000.000
01	03	02	2	01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)					Kab. Takalar	3,00	60.000.000
01	03	02	2	01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)					Kab. Takalar	0,05	200.000.000

01	03	02	2	01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)					Kab. Takalar	1,00	150.000.000
01	03	02	2	01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)					Kab. Takalar	0,10	200.000.000
01	03	02	2	01	0102	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun (KM)					Kab. Takalar	0,20	400.000.000
01	03	02	2	01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)					Kab. Takalar	0,10	200.000.000
01	03	02	2	01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)					Kab. Takalar	0,20	200.000.000
01	03	02	2	01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)					Kab. Takalar	0,25	300.000.000
01	03	02	2	01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	Kab. Takalar	0,30	70.000.000		Kab. Takalar	0,50	2.000.000.000
01	03	02	2	01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)					Kab. Takalar	1,00	500.000.000
01	03	02	2	02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		33,00%	4.535.854.000			80,00%	12.000.000.000
01	03	02	2	02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	Kab. Takalar	0,25	200.000.000		Kab. Takalar	1,00	2.000.000.000
01	03	02	2	02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (Bendung)					Kab. Takalar	1,00	1.500.000.000
01	03	02	2	02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun (KM)					Kab. Takalar	1,00	2.000.000.000
01	03	02	2	02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)					Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	02	2	02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	Kab. Takalar	2,00	4.335.854.000		Kab. Takalar	2,00	2.500.000.000
01	03	02	2	02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)					Kab. Takalar	2,00	3.000.000.000
01	03	02	2	02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)					Kab. Takalar	0,20	100.000.000
01	03	02	2	02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)					Kab. Takalar	1,00	200.000.000

01	03	02	2	02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)				Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	02	2	02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)				Kab. Takalar	3,00	150.000.000
01	03	02	2	02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya (DI)				Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	03	02	2	02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)				Kab. Takalar	1,00	100.000.000
01	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota		98,12%	549.988.800		98,37%	3.035.000.000
01	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		98,12%	549.988.800		98,37%	3.035.000.000
1	03	03	2	01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	Kab. Takalar	11,00	549.988.800	Kab. Takalar	120,00	960.000.000
1	03	03	2	01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dok)				Kab. Takalar	1,00	100.000.000
1	03	03	2	01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Desa)				Kab. Takalar	15,00	150.000.000
1	03	03	2	01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)				Kab. Takalar	4,50	1.125.000.000
1	03	03	2	01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)				Kab. Takalar	466,00	700.000.000
01	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional					100,00%	1.500.000.000

01	03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-		100,00%	1.500.000.000
01	03	04	2	01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/Hari)				Kab. Takalar	1,00	1.500.000.000
01	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)		98,46%	4.397.140.000		98,96%	4.235.000.000
01	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		98,46%	4.397.140.000		98,96%	4.235.000.000
01	03	05	2	01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	Kab. Takalar	1,00	100.000.000	Kab. Takalar	1,00	150.000.000
01	03	05	2	01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)				Kab. Takalar	200,00	60.000.000
01	03	05	2	01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)				Kab. Takalar	15,00	75.000.000
01	03	05	2	01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)				Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	03	05	2	01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	Kab. Takalar	243,00	4.147.140.000	Kab. Takalar	250,00	3.750.000.000
01	03	05	2	01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dok)	Kab. Takalar	1,00	150.000.000	Kab. Takalar	1,00	150.000.000
01	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik		70,00%	1.300.000.000		90,00%	3.946.000.000

01	03	06	2	01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		70,00%	1.300.000.000			90,00%	3.946.000.000
01	03	06	2	01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (m)	Kab. Takalar	1.150,00	1.250.000.000		Kab. Takalar	3.000,00	3.246.000.000
01	03	06	2	01	0021	Peningkatan sistem Drainase lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	Kab. Takalar	1,00	50.000.000				
01	03	06	2	01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dok)					Kab. Takalar	1,00	500.000.000
01	03	06	2	01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)					Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik		100,00%	15.245.000			100,00%	900.000.000
01	03	08	2	01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100,00%	15.245.000			100,00%	900.000.000
01	03	08	2	01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dok)					Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	08	2	01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Org)	Kab. Takalar	50,00	5.000.000		Kab. Takalar	50,00	200.000.000
01	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dok)	Kab. Takalar	1,00	10.245.000		Kab. Takalar	1,00	500.000.000

01	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan		100,00%	21.665.179.294		100,00%	30.500.000.000
01	03	09	2	01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100,00%	21.665.179.294		100,00%	30.500.000.000
01	03	09	2	01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	Kab. Takalar	1,00	21.665.179.294	Kab. Takalar	1,00	30.000.000.000
01	03	09	2	01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dok)				Kab. Takalar	1,00	500.000.000
01	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan		72,20%	12.739.887.500		75,00%	25.250.500.000
01	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Jalan Kabupaten/Kota		72,20%	12.739.887.500		75,00%	25.250.500.000
01	03	10	2	01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dok)	Kab. Takalar	1,00	19.500.000	Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	Kab. Takalar	7,00	10.870.887.500	Kab. Takalar	8,00	20.000.000.000
01	03	10	2	01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	Kab. Takalar	2,00	1.150.000.000	Kab. Takalar	4,00	2.000.000.000
01	03	10	2	01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)				Kab. Takalar	2,00	500.000.000
01	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	Kab. Takalar	1,00	699.500.000	Kab. Takalar	2,00	1.000.000.000
01	03	10	2	01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Jembatan)				Kab. Takalar	2,00	500.000.000
01	03	10	2	01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (Km)				Kab. Takalar	100,00	200.000.000
01	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)				Kab. Takalar	5,00	1.000.000.000
01	03	10	2	01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)				Kab. Takalar	1,00	500.000
01	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli		70,00%	25.999.000		75,00%	257.800.000

01	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		70,00%	10.017.000			75,00%	194.000.000
01	03	11	2	01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Org)					Kab. Takalar	30,00	80.000.000
01	03	11	2	01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)					Kab. Takalar	20,00	22.000.000
01	03	11	2	01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dok)	Kab. Takalar	1,00	10.017.000		Kab. Takalar	1,00	12.000.000
01	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Org)					Kab. Takalar	30,00	80.000.000
01	03	11	2	02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100,00%	-			100,00%	5.800.000
01	03	11	2	02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)					Kab. Takalar	3,00	5.800.000
01	03	11	2	04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		100,00%	15.982.000			100,00%	58.000.000
01	03	11	2	04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Kab. Takalar	30,00	15.982.000		Kab. Takalar	30,00	17.500.000
01	03	11	2	04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)					Kab. Takalar	30,00	17.500.000
01	03	11	2	04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)					Kab. Takalar	30,00	17.500.000

01	03	11	2	04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun (Dok)				Kab. Takalar	1,00	5.500.000
01	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi		50,00%	2.000.000		100,00%	1.900.000.000
01	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		0,00%	-		100,00%	1.700.000.000
01	03	12	2	01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dok)				Kab. Takalar	1,00	300.000.000
01	03	12	2	01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)				Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	12	2	01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dok)				Kab. Takalar	1,00	1.000.000.000
01	03	12	2	01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (Lap)				Kab. Takalar	1,00	200.000.000
01	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100,00%	2.000.000		100,00%	200.000.000
01	03	12	2	03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	Kab. Takalar	1,00	2.000.000	Kab. Takalar	1,00	200.000.000
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
01	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentsae warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		28,67%	175.934.600		100,00%	1.600.000.000
01	04	02	2	01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terselaikannya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		40,00%	80.004.000		100,00%	300.000.000
01	04	02	2	01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumaha	Kab. Takalar	-	-	Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	04	02	2	01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dok)	Kab. Takalar	1,00	40.002.000	Kab. Takalar	1,00	50.000.000

01	04	02	2	01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dok)	Kab. Takalar	1,00	40.002.000	Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	04	02	2	01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dok)	Kab. Takalar	-	-	Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	04	02	2	01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dok)	Kab. Takalar	-	-	Kab. Takalar	1,00	100.000.000
01	04	02	2	03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		46,00%	95.930.600		100,00%	1.200.000.000
01	04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	Kab. Takalar	3,00	95.930.600	Kab. Takalar	20,00	500.000.000
01	04	02	2	03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)				Kab. Takalar	15,00	600.000.000
01	04	02	2	03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)				Kab. Takalar	5,00	100.000.000
01	04	02	2	05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0,00%	-		100,00%	100.000.000
01	04	02	2	05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dok)				Kab. Takalar	4,00	100.000.000
01	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani		30,00%	8.416.881.000		68,50%	2.750.000.000
01	04	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		50,00%	200.000.000		100,00%	450.000.000
01	04	03	2	02	0008	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun / Tereview / Terlegalisasi (Dok)	Kab. Takalar	1,00	200.000.000	Kab. Takalar	1,00	350.000.000

01	04	03	2	02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dok)					Kab. Takalar	1,00	100.000.000
01	04	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		10,00%	8.216.881.000			37,00%	2.300.000.000
01	04	03	2	03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Kab. Takalar	217,00	8.216.881.000		Kab. Takalar	50,00	1.250.000.000
01	04	03	2	03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dok)					Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	04	03	2	03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)					Kab. Takalar	25,00	1.000.000.000
01	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		0,00%	-			80,00%	1.175.000.000
01	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		0,00%	-			80,00%	1.175.000.000
01	04	04	2	01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)					Kab. Takalar	20,00	500.000.000
01	04	04	2	01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)					Kab. Takalar	15,00	600.000.000
01	04	04	2	01	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)					Kab. Takalar	1,00	75.000.000

01	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		25,00%	1.661.000.000		60,00%	3.425.000.000
01	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan		25,00%	1.661.000.000		60,00%	3.425.000.000
01	04	04	2	01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	umlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dok)				Kab. Takalar	1,00	75.000.000
01	04	04	2	01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	Kab. Takalar	10,00	1.661.000.000	Kab. Takalar	10,00	2.800.000.000
01	04	04	2	01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Lap)				Kab. Takalar	1,00	50.000.000
01	04	04	2	01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)				Kab. Takalar	1,00	500.000.000
01	04	06				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		-	-		100,00%	25.000.000
01	04	06	2	01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		-	-		100,00%	25.000.000
01	04	06	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)				Kab. Takalar	1,00	25.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugasnya yaitu sebagai membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, sumber daya air,tata ruang dan bina konstruksi.

Tabel II-8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Takalar

ASPIRASI

KODE						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Besaran/ Volume	Catatan
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
01	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
01	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
01	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
01	03	02	2	01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		
						Pembangunan perkuatan tebing	Dusun Bangkotinggia dan dusun dande-dandere , Kab. Takalar		500 m	
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	Dusun Je'ne, pappanambea, parappa dan Tandotana, Kab. Takalar		500 m	
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	dusun maccini ayo, dusun lambutoa desa kampung beru pemekaran desa pa'la'lakkang kecamatan galesong kabupaten takalar, Kab. Takalar		500 m	
1	03	02	2	01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	Lingkungan Biring Je'ne, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar		500 m	
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	Lingkungan Parialau, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar		500 m	
						Pengendalian dan pencegahan abrasi pantai	Dusun Cikoang Desa Cikoang kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar , Kab. Takalar		500 m	

POKIR

KODE						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Besaran/ Volume	Catatan
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
01	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
01	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
01	03	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
01	03	02	2	01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		
						Pembangunan perkuatan tebing	Dusun Bangkotinggia dan dusun dande-dandere , Kab. Takalar		500 m	aspirasi
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	Dusun Je'ne, pappanambea, parappa dan Tandotana, Kab. Takalar		500 m	aspirasi
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai	dusun maccini ayo, dusun lambutoa desa kampung baru pemekaran desa pa'la'lakkang kecamatan galesong kabupaten takalar, Kab. Takalar		500 m	aspirasi
1	03	02	2	01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		
						Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi tanggul sungai dan laut serta pemecah ombak	DUSUN BOLO DESA BANGGAE KECAMATAN MANGARABOMBANG, Kab. Takalar		200 m	pokir

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 yang dioperasinalisasikan oleh perangkat daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 yaitu **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”**. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- 2) PDRB per kapita (juta);
- 3) Kontribusi PDRB Provinsi;
- 4) Tingkat Kemiskinan;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 6) Indeks Rasio Gini;
- 7) Indeks Modal Manusia;
- 8) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel III-1.

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan

untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Sumber data : RKP Tahun 2026

3.2. Tujuan Dan Sasaran Dinas PUTRPKP Kab. Takalar

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025 memuat outcome prioritas, program dan sub kegiatan yang mendukung asta cita.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 adalah **“Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Dasar Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan Tujuan tersebut dicapai melalui 4 (empat) Sasaran, yaitu :

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur

Sasaran 2: Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 3: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 4: Meningkatkan tata kelola kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas PUTRPKP Tahun 2026 berpedoman pada pada Rancangan Renstra Dinas PUTRPKP Tahun 2025 - 2029 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel III-2.

Tujuan dan Sasaran Dinas PUTRPKP Kab. Takalar periode Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.1.04.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar, Perumahan Permukiman, dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	79,77	79,90	80,63	80,53	82,07	82,78	83,36	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	5,13	7,00	8,00	10,00	12,00	13,50	15,00	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	22,08	23,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	
		Meningkatkannya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,38	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	10	10	10	15	15	20	20	
			Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	70	75	77	80	85	87	90	
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	80	85	88	90	93	95	100	

Tabel III-3.
 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama(IKU) Dinas PUTRPKP Kab. Takalar untuk Renja Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET 2026
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
- Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Dasar, Perumahan Permukiman, dan Penataan Ruang yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	79,77	80,63
		Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	5,13	8,00
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	22,08	24,00
		Meningkatkannya Pemenuhan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,38	96,50
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	10	10
			Tingkat Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat (Nilai)	70	77
			Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	80	88

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas PUTRPKP Tahun 2026 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Daerah. sebagaimana dalam RKP Tahun 2026 disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS); bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD ini akan dioperasionalisasikan dalam rencana kerja perangkat daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.1.1. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PUTRPKP yang menunjang Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita Tahun 2026 ***Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;*** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Program Prioritas Presiden (Nasional)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kemiskinan Ekstrem	Program Kawasan Permukiman(1.04.03)	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10(Sepuluh) Ha. (1.04.03.2.03)	Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (1.04.03.2.03.0002)	Rp 289.000.000,-
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman (1.04.04)	Kegiatan: (1.04.04.2.01) Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: (1.04.04.2.01.0001) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 28.704.000,-
2. Sekolah Rakyat	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 198.751.900,-
	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.372.201.100,-
	Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Rp 11.371.190.000,-
3. Penurunan Stunting	1.03.05 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	-
			1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp 39.236.000,-
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	Rp 2.209.419.000,-
4. 3 Juta Rumah (Program Perumahan Flpp)	1.04.03 - Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sub Kegiatan: Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP (1.04.03.2.02.0008)	Rp 376.722.500,-
		1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-
	1.04.04 - Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 28.704.000,-
			1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 59.800.000,-
	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 49.773.000,-

4.1.2 Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PUTRPKP yang menunjang Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Program Prioritas Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.372.201.100,-
78	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Rp 11.371.190.000,-
82	Program Pengembangan Perumahan	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 49.773.000,-
				1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 14.032.100,-
				1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 15.000.000,-
				1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 16.577.000,-
				1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 15.209.600,-
				1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 6.018.000,-
				1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 270.000.000,-
				1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 578.500.000,-
83	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 10.620.500,-
				1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 4.923.000,-
				1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp 100.000.000,-
				1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp 2.000.000.000,-
85	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 198.751.900,-

				1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp 351.043.400,-
86.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp 59.371.100,-
				1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp 39.236.000,-
				1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	Rp 2.209.419.000,-
				1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 185.000.000,-
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater	Rp 6.000.000.000,-
				1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Rp 1.450.000.000,-
				1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp 500.000.000,-
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 2.500.000.000,-
				1.03.02.2.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp 1.000.000.000,-
				1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1.200.000.000,-
				1.03.02.2.02.0053 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp 1.000.000.000,-
88	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp 1.055.008.000,-
				1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 1.605.000.000,-
91	Program Kawasan Permukiman	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 289.000.000,-
				1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 304.650.000,-
94	Program Pengelolaan Sampah	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Rp 1.240.000,-
96	Program Penanggulangan Bencana	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 270.000.000,-
				1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban	Rp 578.500.000,-
				Bencana	
				1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 16.577.000,-

4.1.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas PUTRPKP yang menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Kabupaten Takalar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
26	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Rp 11.371.190.000,-
				1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 493.490.000,-
				1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp 363.100.000,-
				1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	Rp 1.618.547.000,-
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp 59.371.100,-
				1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rp 39.236.000,-
				1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	Rp 2.209.419.000,-
				1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 185.000.000,-
29	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.372.201.100,-
30	Program Pengembangan Perumahan	1.04.02 - Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 49.773.000,-
				1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 14.032.100,-
				1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 15.000.000,-
				1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 16.577.000,-
				1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 15.209.600,-
				1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 6.018.000,-
				1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 270.000.000,-
				1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 578.500.000,-
31	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 10.620.500,-
				1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 4.923.000,-
				1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp 100.000.000,-

				1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp 2.000.000.000,-
33	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 198.751.900,-
				1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp 351.043.400,-
34	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp 1.055.008.000,-
				1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 1.605.000.000,-
37	Program Pengelolaan Persampahan	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Rp 1.240.000,-
40	Program Pengelolaan Bencana	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 270.000.000,-
				1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 578.500.000,-
				1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 16.577.000,-
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater	Rp 6.000.000.000,-
				1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	Rp 1.450.000.000,-
				1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rp 500.000.000,-
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 2.500.000.000,-
				1.03.02.2.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Rp 1.000.000.000,-
				1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1.200.000.000,-
				1.03.02.2.02.0053 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rp 1.000.000.000,-

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renja

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 berjumlah 14 (empat belas) Program, 29(Dua puluh Sembilan) Kegiatan dan 144(serratus empat puluh empat) sub kegiatan, Rp 56.433.003.451,- (Lima puluh Enam Milyar Empat Ratus tiga puluh tiga juta Tiga ribu Empat ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TAKALAR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						56.433.003.451,00							83.653.550.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						56.090.056.051,00							82.832.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						51.682.684.151,00							79.230.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.331.194.871,00						-	7.145.000.000,00	
		[Terpenuhinya layanan penunjang kinerja perangkat daerah]	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100.00	100.00	100.00	100.00	8.331.194.871,00	-	-	-	-	-	-	7.145.000.000,00	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	42.389.900,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	53.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.916.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.876.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.755.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		2.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.575.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.575.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.110.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	3.585.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Berita Acara	4.996.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.681.809.671,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	6.430.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				85 Orang/bulan	6.644.442.371,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		6.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	13.001.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				0 Dokumen	4.001.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.006.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	9.790.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	7.567.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANSAH	-	-	-		3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	74.890.900,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	4.984.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	28.492.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	41.414.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	13.765.600,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-	-	29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	13.160.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	605.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	157.051.300,00			-	-	-	-	40.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.806.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.384.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	136.839.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	2.022.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif Pemerintah Digital	-		5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.015.887.500,00			-	-	-	-	352.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	274.967.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	740.920.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	345.400.000,00			-	-	-	-	28.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				31 Unit	41.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	3.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	300.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	14.636.193.280,00						-	19.740.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan SDA dan pengaman pantai serta pengelolaan sistem irigasi]	Persentase panjang irigasi kondisi baik	50.00	20.00	33.00	57.00	14.636.193.280,00	-	-	-	-	-	-	19.740.000.000,00	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.627.576.080,00			-	-	-	-	11.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0 KM	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>				0 Lembaga	74.946.080,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				5 KM	1.050.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Pengemba ngan Infrast ruktur	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan</i>				5 KM	730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Pengemba ngan Infrast ruktur	-		375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater														
			<i>Panjang Breakwater yang Dibangun</i>				0 KM	6.000.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi</i>				5 KM	850.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				0 KM	1.450.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				0 Unit	500.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.008.617.200,00			-	-	-	-	8.365.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>				1 KM	2.500.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun</i>				0 KM	1.000.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				1 KM	1.200.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 KM	200.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>				1 Lembaga	58.617.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				0 UNIT	1.000.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	2.902.375.800,00						-	4.000.000.000,00	
		[Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan]	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100.00	98.13	98.12	98.37	2.902.375.800,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.902.375.800,00			-	-	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>				350 Unit	1.055.008.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 Dokumen	185.949.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	2.902.375.800,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>				1 Liter/Detik	1.050.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan]	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100.00	98.13	98.12	98.37	2.902.375.800,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa														
			<i>Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				1 Desa	510.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				1 Liter/Detik	1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				50 SR	1.605.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	2.902.375.800,00	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000,00	-
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1 Lembaga	53.618.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				1 M³/Hari	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan				1 M³/Hari	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman]	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100.00	0	98.46	98.96	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat														
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				1 M³/Hari	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				1 M³/Hari	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman]	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100.00	0	98.46	98.96	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50 Rumah Tangga	39.236.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa														
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Desa	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman]	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100.00	0	98.46	98.96	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				2 Unit	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>				30 Orang	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman]	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	100.00	0	98.46	98.96	2.493.026.100,00	-	-	-	-	-	-	980.000.000,00	-
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>				50 Rumah Tangga	2.209.419.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, DANA ALOKASIUMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	1.920.496.000,00						-	1.600.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	65.00	57.72	70.00	90.00	1.920.496.000,00	-	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.920.496.000,00			-	-	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5000 M	1.406.046.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	1.920.496.000,00	-	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00	-
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				3000 Meter	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	65.00	57.72	70.00	90.00	1.920.496.000,00	-	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00	-
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	514.450.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	1.920.496.000,00	-	-	-	-	-	-	1.600.000.000,00	-
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	549.795.300,00						-	9.000.000,00	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang ditata]	Persentase penataan bangunan gedung	100.00	100.00	100.00	100.00	549.795.300,00	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	549.795.300,00			-	-	-	-	9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				10 Orang	198.751.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	351.043.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	5.372.201.100,00						-	15.600.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya]	Persentase penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten	100.00	100.00	100.00	100.00	5.372.201.100,00	-	-	-	-	-	-	15.600.000.000,00	-
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.372.201.100,00			-	-	-	-	15.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	5.372.201.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DBH SDA PERTAMBA NGAN MINYAK BUMI-ACEH-INF RASTRUKTUR	-	-	-		15.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	15.066.881.000,00						-	29.212.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian daerah]	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	95.00	63.46	72.20	75.00	15.066.881.000,00	-	-	-	-	-	-	29.212.000.000,00	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	15.066.881.000,00			-	-	-	-	29.212.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	98.012.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				0 KM	102.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	493.490.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				8,05 KM	11.371.190.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata Pengemba ngan Infrast ruktur	-		27.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	527.042.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	493.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				1 Meter	363.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				1 Meter	1.618.547.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Kemandiria n Pangan, Ketahanan Energi dan Air	-		620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	147.032.700,00						-	173.000.000,00	
		[Meningkatkan kompetensi tenaga kerja kosntruksi]	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.00	33.33	100.00	100.00	147.032.700,00	-	-	-	-	-	-	173.000.000,00	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	51.391.600,00			-	-	-	-	67.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>				0 Orang	23.302.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				0 Lembaga	11.936.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan</i>				1 Dokumen	8.313.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				30 Orang	7.840.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.495.500,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				0 Orang	28.495.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	67.145.600,00			-	-	-	-	66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>				1 Paket Pekerjaan	34.227.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				0 Bangunan Konstruksi	10.668.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				0 Lembaga	10.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				0 Badan Usaha	11.750.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	260.548.000,00						-	96.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	100.00	50.00	50.00	100.00	260.548.000,00	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	231.288.000,00			-	-	-	-	92.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	112.872.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0007	Penyebbarluasan Informasi Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>				0 Publikasi	42.960.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	55.906.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				0 Laporan	19.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	29.260.000,00			-	-	-	-	4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Sistem Informasi	29.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4.407.371.900,00							3.602.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	1.031.909.700,00						-	952.000.000,00	
		[Meningkatnya jumlah rumah layak huni]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00	14.04	28.67	100.00	1.031.909.700,00	-	-	-	-	-	-	952.000.000,00	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	66.836.700,00			-	-	-	-	97.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				1 Dokumen	14.032.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				1 Dokumen	16.577.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	15.209.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	6.018.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	915.300.000,00			-	-	-	-	705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				7 Unit Rumah	270.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				5 Unit Rumah	578.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan</i>				0 Unit Rumah	66.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	49.773.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	49.773.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	1.167.061.800,00						-	1.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Berkurangnya luas kawasan kumuh]	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	100.00	0.00	30.00	68.50	1.167.061.800,00	-	-	-	-	-	-	1.360.000.000,00	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	388.411.800,00			-	-	-	-	385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi				1 Dokumen	376.772.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		-	-	-	-	-	-	1.167.061.800,00	-	-	-	-	-	-	1.360.000.000,00	-
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	11.639.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		[Berkurangnya luas kawasan kumuh]	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	100.00	0.00	30.00	68.50	1.167.061.800,00	-	-	-	-	-	-	1.360.000.000,00	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	778.650.000,00			-	-	-	-	975.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	289.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				0 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0 Unit	304.650.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	92.856.900,00						-	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh]	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100.00	0.00	0.00	80.00	92.856.900,00	-	-	-	-	-	-	290.000.000,00	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	92.856.900,00			-	-	-	-	290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	28.704.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				2 Unit	59.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				0 Rumah Tangga	4.352.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	2.115.543.500,00						-	1.000.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan]	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100.00	100.00	25.00	60.00	2.115.543.500,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	2.115.543.500,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	10.620.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				0 Laporan	4.923.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan															
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				0 Lokasi	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan															
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				20 Lokasi	2.000.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	J U M L A H							56.433.003.451,00							83.653.550.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2026. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2025, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2025 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas PUTRPKP dapat mempedomani isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Rencana Kerja Dinas PUTRPKP tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2026. Akhirnya,ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

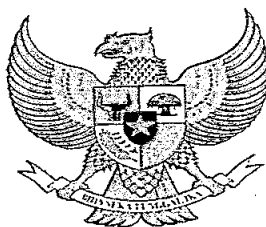
Takalar, 30 Juni 2025
Kepala Dinas,



Budiar Rosal Saleh. S.STP..M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19800520 199810 1 001



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 246 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024, Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun 2026, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026;
 - b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
 - c. menyusun rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir serta perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar;
 - d. menyempurnakan rancangan Rencana Kerja berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda;
 - e. kepala perangkat daerah menyampaikan hasil

- penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Bupati Takalar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Juli 2025

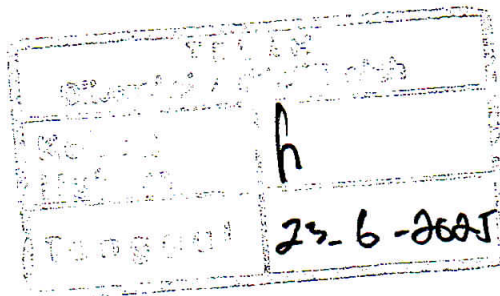
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Tembusan.

1. Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar di Takalar;
2. Masing-masing yang bersangkutan

Paraf Komunikasi	
DPUTRPKP	Paraf/Tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. DINAS	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 246 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas PUTRPKP
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas PUTRPKP
3.	Kelompok Kerja	1. Para Kepala Bidang 2. Kasubag Perencanaan 3. Pengolah Data 4. Staf
4.	Tim Pendamping	Tim Perencana Bappelitbangda Kabupaten Takalar



BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Paraf Komunikasi	
DPUTRPKP	Paraf/Tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. DINAS	

PELAM

Diserahi / disertai oleh

Kebag	h
Tempat	h
Tanggal	23.6.2025

